



Pembuatan Dokumen Legalitas Bisnis: Upaya Memperluas Akses Permodalan UMKM di Desa Unit Bangun Rejo

Chairani Sitya¹, Arief Wicaksono Nur Qowiyyu¹, Junaidin², Supriatno Salam², Baso Didik Hikmawan^{2*}

¹ Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia.

² Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia.

* Alamat Koresponding. E-mail: didikhikmawan@unmul.ac.id

Dikirim: 1 Oktober 2024

Direvisi: 30 Oktober 2024

Diterima: 25 November 2024

Academic Editor: Alamsyah

Catatan Penerbit: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Mulawarman tetap netral sehubungan dengan klaim yurisdiksi dalam gambar ataupun rancangan yang diterbitkan pada jurnal ini.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT: The principal challenge encountered by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bangun Rejo Village is restricted access to finance, resulting from the absence of legal business documents, specifically the Business Identification Number (NIB) and Tax Identification Number (NPWP). This community service initiative aimed to aid MSME participants in acquiring NIB and NPWP to enhance their access to capital. The implementation strategy employed a door-to-door approach, entailing direct visits to the dwellings of business owners for socialization, data gathering, and assistance in acquiring legal documents. The results of this program suggest a substantial increase in the number of business actors who now possess legality documents, thereby expanding the opportunities for capital access. The intensive and personal approach was successful in attaining the program's objectives, despite the challenges of low digital literacy and technical difficulties during the registration process.

KEYWORDS: MSMEs; business legality; capital access; Business Identification Number; Tax Identification Number

ABSTRAK: Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bangun Rejo adalah keterbatasan akses terhadap permodalan yang disebabkan oleh kurangnya dokumen legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Program pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM dalam memperoleh NIB dan NPWP guna memperluas akses terhadap permodalan. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan *door to door*, yang melibatkan kunjungan langsung ke kediaman pelaku usaha untuk sosialisasi, pengumpulan data, dan pendampingan pembuatan dokumen legalitas. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen legalitas, yang pada gilirannya membuka peluang akses permodalan yang lebih luas. Meskipun terdapat hambatan seperti rendahnya literasi digital dan kendala teknis dalam proses pendaftaran, pendekatan yang intensif dan personal terbukti efektif dalam mencapai tujuan program.

Kata Kunci: UMKM; legalitas usaha; akses permodalan; Nomor Induk Berusaha; Nomor Pokok Wajib Pajak.

1. PENDAHULUAN

Permodalan merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi berkembangnya suatu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak sekali pelaku UMKM yang tidak dapat melakukan ekspansi maupun mempertahankan usahanya dikarenakan ketergantungan dengan modal pribadi dan kesulitan dalam mengakses permodalan baik oleh lembaga permodalan, perbankan, maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan terkait permodalan juga tidak lengkapnya data-data usaha yang dibutuhkan sebagai persyaratan dalam pengurusan permodalan. Salah satu data utama yang dibutuhkan oleh lembaga permodalan diantara adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Rudiyanto, 2022).

Banyak sekali premis yang melatarbelakangi tidak lengkapnya kedua data tersebut, diantaranya yakni persepsi pelaku usaha yang menganggap bahwa pembuatan dokumen tersebut rumit (Aysa & Sutantri, 2023), maupun keengganan penambahan tanggung jawab bagi pribadi pelaku usaha terutama terkait pembayaran pajak (Rachmat & Boer, 2024). Walaupun banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan keberadaan dokumen tersebut seperti kepastian di mata hukum, kemudahan pengembangan, pemasaran, dan pendampingan usaha, terutama

Cara mensitasi artikel ini: Sintya C, Qowiyyu AWN, Junaidin, Salam S, Hikmawan BD. Pembuatan dokumen legalitas bisnis: Upaya memperluas akses permodalan UMKM di Desa Unit Bangun Rejo. *ANDIL Mulawarman J Comm Engag.* 2025; 2(1): 14-18.

kemudahan dalam mengakses permodalan, masih banyak pelaku usaha yang belum melengkapi dokumen-dokumen pendukung usaha (Kusmanto & Warjio, 2019).

Berdasarkan hasil studi dari Badan Pusat Statistik Tenggarong Seberang (2023), Desa Bangun Rejo merupakan desa dengan penduduk paling banyak di Kecamatan Tenggarong Seberang sebesar 20.964 jiwa. Satu dari dua Koperasi Unit Daerah (KUD) di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang berada di Desa Bangun Rejo yang menaungi lebih dari dua ratus pelaku UMKM. Hal ini sebagai indikator bahwa sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang kuat berkembang di wilayah tersebut mengikuti tuntutan dari banyaknya penduduk pada wilayah tersebut. Kendati banyaknya pelaku usaha di wilayah Desa Bangun Rejo, masih terdapat pelaku usaha yang belum mempunyai dokumen NIB maupun NPWP yang menghalangi mereka dalam mengakses perizinan, permodalan dan pendampingan dari berbagai lembaga.

Perkara ini secara langsung terjadi dalam masa pengabdian ketika Dinas Koperasi dan Unit Kecil Menengah Kutai Kartanegara melakukan pelatihan serta bantuan berupa insentif permodalan terhadap anggota KUD di Desa Bangun Rejo. Terdapat beberapa pelaku usaha yang mengungkapkan bahwa mereka tidak melengkapi persyaratan dokumen berupa NIB dan NPWP dikarenakan tidak mempunyai dokumen tersebut serta tidak mengetahui cara pembuatannya. Maka berdasarkan masalah tersebut, kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan adalah dengan melaksanakan program kerja pengabdian berupa pendampingan pembuatan NIB dan NPWP yang diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengakses dokumen persyaratan pembiayaan.

2. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan program kerja pengabdian masyarakat ini melibatkan 12 anggota KUD Bangun Rejo sebagai penggiat UMKM yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli sampai dengan 22 Agustus 2024 dengan cara mengunjungi satu per satu tempat tinggal pelaku usaha. Adapun langkah yang dilakukan dalam melaksanakan program kerja tersebut terdiri atas tiga jenis tahapan yakni masa persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan.

Masa persiapan diawali dengan koordinasi dengan pemerintah desa hingga pengidentifikasian masalah dalam sektor UMKM di Desa Bangun Rejo, dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pembuatan dokumen legalitas usaha berupa NIB dan NPWP melalui metode *door to door*, hingga masa pasca pelaksanaan di mana dilakukan penyerahan dokumen dalam bentuk fisik terhadap pelaku usaha dan melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan program kerja. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bukit Makmur Jaya meliputi upaya pemenuhan regulasi pada perkebunan sawit rakyat, optimalisasi administrasi perkebunan sawit rakyat, dan optimalisasi hasil perkebunan sawit rakyat. Upaya pemenuhan regulasi pada perkebunan sawit rakyat dilakukan melalui kegiatan digitalisasi perpetaan lahan perkebunan sawit, sosialisasi sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) untuk perkebunan sawit, serta edukasi etika bisnis syariah dan akad muzara'ah untuk perkebunan sawit. Upaya optimalisasi administrasi perkebunan sawit rakyat dilakukan melalui kegiatan edukasi pembukuan tunggal sebagai buku catatan usaha tani dan pembukuan ganda untuk timbangan tandan buah sawit. Upaya optimalisasi hasil perkebunan sawit rakyat dilakukan melalui pembuatan visualisasi data perkebunan sawit, sosialisasi pemanfaatan limbah perkebunan sawit dan hasil perkebunan sawit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kerja ini diawali dengan koordinasi dengan pemerintah desa (**Gambar 1**) terkait problematika dari sektor UMKM di Desa Bangun Rejo yang langsung mengarahkan kepada KUD Bangun Rejo yang menaungi banyak pelaku UMKM. Berdasarkan diskusi lebih lanjut dengan Ketua KUD serta turut partisipasi di kegiatan KUD juga banyak berinteraksi dengan pelaku usaha untuk mengulik lebih mendalam terkait profil UMKM.



Gambar 1. Koordinasi Dengan Pemerintah Desa Bangun Rejo

Metode *Focus Group Discussion* (FGD) (**Gambar 2**) digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan pelaku UMKM. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, ditemukan salah satu persoalan pelaku usaha yakni ketidaklengkapannya dokumen legalitas pelaku usaha yang menghambat mereka dalam mengakses permodalan. Sebagai bentuk kegiatan pemecahan masalah ditetapkan untuk melakukan pendampingan pembuatan legalitas usaha berupa NIB dan NPWP yang merupakan syarat utama dalam permohonan pembiayaan di lembaga permodalan (Budiarto dkk., 2022).



Gambar 2. *Focus Group Discussion* Bersama Pihak KUD

Selanjutnya dilakukan survei terhadap para pelaku usaha yang belum dan ingin memiliki dokumen legalitas usaha yang diikuti dengan penyebaran informasi pelaksanaan kegiatan kunjungan *door to door* via daring melalui aplikasi *WhatsApp*. Materi sosialisasi terkait pengenalan mendalam terhadap dokumen legalitas usaha serta kelengkapan praktek saat sosialisasi dan pendampingan turut dipersiapkan pada tahapan ini.

Pelaksanaan pendampingan diawali dengan mendatangi kediaman pelaku usaha, meminta kelengkapan berkas pelaku usaha sebagai persyaratan pembuatan NIB dan NPWP, memaparkan fungsionalitas dan tata cara pembuatan kedua dokumen, hingga melakukan pendampingan dan demonstrasi dalam pembuatan dokumen tersebut terhadap pelaku usaha yang diharapkan agar pelaku usaha lebih familiar dan memiliki wawasan mendalam terkait dengan pengurusan NIB dan NPWP secara digital melalui laman resmi *Online Single Submission* (OSS) dan *e-registration* Direktorat Jenderal Pajak (*e-reg DJP*) (Putra dkk., 2022).

Dalam masa pelaksanaan program kerja ini, banyak sekali ditemui hambatan terutama terkait dengan rendahnya literasi digital pelaku usaha, laman pembuatan dokumen yang sulit untuk diakses, hingga data pemilik usaha yang sudah pernah didaftarkan namun tidak mengetahui rincian dokumennya yang mana menjadi tantangan utama pada masa pendampingan pembuatan dokumen dikarenakan adanya restriksi yang membatasi satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya dapat mendaftarkan satu akun baik melalui laman OSS maupun *e-reg* (Latifah dkk., 2023). Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan antusiasme dan kerja sama dari para pelaku usaha yang mengikuti pendampingan ini. **Gambar 3** menunjukkan penyerahan dokumen legalitas usaha untuk pelaku UMKM di lingkungan Desa Bangun Rejo.



Gambar 3. Penyerahan Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak ke Pelaku Usaha UMKM di Desa Bangun rejo

Pada masa pasca pelaksanaan dilakukan penyerahan secara langsung dokumen NIB dan NPWP dalam bentuk fisik kepada pelaku usaha serta penyerahan akun OSS dan *e-reg* via daring melalui aplikasi WhatsApp. Serta dilanjutkan dengan edukasi kembali terkait dengan manfaat dokumen yang telah diberikan serta diskusi terkait dengan kepuasan dan evaluasi dari pelaku usaha terhadap pendampingan yang telah dilaksanakan. **Tabel 1** menampilkan daftar pelaku UMKM yang berhasil didampingi dalam pelaksanaan program kerja ini.

Tabel 1. Daftar Pelaku UMKM yang Berhasil Didampingi

No	Nama	Jenis UMKM
1.	Dinah	Jasa Penatu
2.	Endang Pratiwi	Aksesoris dan Kerajinan Tangan
3.	Hartini	Jamu dan Bawang Goreng
4.	Irmawati/Paimin	Jasa Penatu
5.	Isminah/M. Hadiono	Depot Isi Ulang, Peternakan Lebah, Perkebunan, Produk Keripik Pisang
6.	Marsini/Wahyono	Toko Kelontong, Kursus Mobil, Angkringan, dan Katering
7.	Martinah	Pembibitan Pohon
8.	Mastidah	Pertanian Padi
9.	Mufaidah	Toko Kelontong dan Depot Isi Ulang
10.	Raudah	Perkebunan Cabai
11.	Rina Yulianti/Sunyoto	Toko Pakaian Eceran dan Jasa Parkir
12.	Sumiati/Sutarno	Toko Kelontong

4. KESIMPULAN

Program pendampingan pembuatan NIB dan NPWP bagi pelaku UMKM di Desa Bangun Rejo merupakan langkah strategis untuk memfasilitasi akses permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha. Program ini berhasil mengatasi kendala administratif dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, yang seringkali menghambat pengembangan UMKM. Pendekatan *door to door* yang digunakan berhasil meningkatkan partisipasi dan antusiasme pelaku usaha, meskipun menghadapi hambatan seperti akses laman yang sulit dan data yang tidak sinkron kerjasama dari pelaku usaha sangat membantu lancarnya pelaksanaan pendampingan dan demonstrasi. Hasilnya, pelaku UMKM yang didampingi kini memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan siap untuk memanfaatkan peluang permodalan serta pendampingan usaha lebih lanjut.

Ucapan Terima Kasih: Terima kasih kepada Pemerintah Desa Bangun Rejo yang telah memfasilitasi penulis dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Bangun Rejo. Terima kasih juga kepada Bapak Budiono selaku ketua KUD yang telah mengkoordinir anggotanya untuk menjadi partisipan. Serta terima kasih kepada pelaku usaha yang telah menjadi partisipan untuk pendampingan ini sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Kontribusi Penulis: –

Sumber Pendanaan: –

Konflik Kepentingan: Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan..

REFERENSI

- Aysa, I. R., & Sutantri. 2023. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) dan *Rebranding* Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Bulu Kediri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi*, 2(4), 133-141.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. 2023. *Kecamatan Tenggarong Seberang dalam Angka 2023*. CV Mahendra Mulya, Tenggarong.
- Budiarto, F. N. R., dkk. 2022. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Karya Unggul: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124.
- Kusmanto, H., & Warjio. 2019. Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 320-327.
- Latifah, L., dkk. 2023. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan untuk Keberlanjutan Usahanya di Kelurahan Bulak, Kota Surabaya. *JEPKM: Jurnal Edukasi dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 9-25.
- Putra, C. A., dkk. 2022. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149-157.
- Rachmat, A. A., & Boer, K. M. 2024. *Empowerment of MSM Owners Through Assistance in Obtaining NPWP in Lawe-Lawe, Penajam. Dharmahita: Journal Of Community Service and Development*. 1(1), 54-57.
- Rudiyanto, R. 2022. Akses Permodalan UMKM ke Perbankan. *Seminar Nasional Riset Ekonomi dan Bisnis*, Lamongan.

This is an open access article which is publicly available on our journal's website under Institutional Repository at
<https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/ANDIL/index>